

Preferensi dan Rasionalisasi Pilihan Politik Perempuan Minang Perkotaan di Kota Padang terhadap Perilaku Memilih dalam Pemilihan Umum

Oleh: Yoserizal dan Asrinaldi A

ABSTRACT

This study was intended to describe the political preference and rationalization of Minang urban women and their political response. This study was conducted in two kelurahan (villages) representing the characteristics of central urban and suburban in the city of Padang. Quantitative approach with survey method was used in this study. Respondents in this study were chosen through stratified random sampling. The finding of this study indicated that the political preference of Minang urban women tended to be asymmetrical, while their political rationalization did not run perfectly. Their restricted political preferences were influenced by their restricted in the process of political socialization since their childhood.

Kata kunci: *Preferensi politik, rasionalisasi politik, perilaku memilih, pemilihan umum, perempuan Minang*

I. PENDAHULUAN

Tidak dapat dinafikan perilaku memilih seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan menjadi sebuah variabel stimulus yang dapat melahirkan respons individu. Pada dasarnya, lingkungan dapat membentuk struktur kognisi dan afeksi politik mereka yang pada akhirnya di respons dalam bentuk tindakan. Oleh karenanya, dengan memahami karakteristik ling-

kungan sosial dimana individu berinteraksi, maka dapat pula memahami kecenderungan respons politik yang akan diberikan seseorang. Bagi sebagian ahli perilaku politik, variabel lingkungan menjadi salah satu pertimbangan penting untuk mengartikan kemana kecenderungan perilaku politik individu di sebuah daerah.

Beberapa variabel lain yang mempengaruhi pilihan politik perempuan Minang dalam pemilihan umum adalah rasionalitas politik dan kognisi politiknya¹. Fenomena ini menarik untuk didalami melalui sebuah penelitian. Sebagai individu yang tinggal di daerah perkotaan, perempuan Minang ini memiliki pilihan yang banyak untuk memperoleh informasi politik. Sebagaimana diketahui informasi politik inilah yang dapat membantu seseorang untuk memberikan penilaian dan evaluasi sehingga muncul suatu pertimbangan yang rasional dalam memberikan suara pada pemilihan umum. Tetapi justru kecenderungan ini tidak sepenuhnya berlaku. Preferensi politik mereka tidak berkembang sesuai mengikuti dinamika politik kepartaian dan politik yang ada di sebuah daerah urban.

Oleh karenanya penelitian ini mencoba mendalami mengapa kecenderungan ini terjadi. Beberapa aspek penting yang sekaligus menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, sekaligus menjadi masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah bentuk preferensi dan rasionalisasi pilihan politik perempuan Minang di perkotaan yang diwujudkan

dalam perilaku memilihnya? Apakah preferensi dan rasionalisasi pilihan politik tersebut mempengaruhi perilaku politik yang lain terutama dalam merespons gejala politik yang ada disekitarnya?

II. TINJAUAN PUSTAKA

Aspek Yang Mempengaruhi Pilihan Politik Perempuan Minang

Merujuk pada hasil penelitian Asrinaldi dkk² yang lalu, terkait dengan perilaku memilih perempuan Minangkabau perkotaan, ditemukan tiga aspek yang mempengaruhi perilaku memilih perempuan Minang yang tinggal di daerah perkotaan. Ketiga aspek tersebut adalah: *Pertama*, adanya keyakinan terhadap nilai agama yang merupakan prinsip dasar bagi seseorang dalam bertingkah laku. Pengaruh nilai-nilai agama bagi sebagian besar masyarakat Minangkabau tidak dapat dinafikan. Bahkan dalam kehidupan sehari-harinya mereka memegang teguh nilai agama ini. Besarnya pengaruh nilai agama ini, tidak jarang pula dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mempengaruhi pilihan mereka dalam politik. Inilah fenomena yang terjadi dalam melihat kecenderungan perilaku memilih (*voting behavior*) perempuan etnik Minangkabau di daerah perkotaan.

¹ Asrinaldi dan Kusdarini. 2005. "Bagaimana Perempuan *Voting*: Kajian tentang perilaku memilih perempuan etnis Minangkabau di daerah urban pada pemilu 2004". *Laporan Penelitian Studi Kajian Wanita-DP3M* Dikti.

² *Ibid*

Kedua, ikatan primordialisme seperti kesukuan dan garis keturunan merupakan faktor lain yang menentukan dalam perilaku memilih seseorang. Bagi perempuan etnik Minang, terutama yang memiliki tingkat pendidikan rendah cenderung menjadikan aspek ini sebagai bagian pertimbangannya. Ikatan kekerabatan dan garis keturunan (geneologi) di daerah Minangkabau sangatlah erat. Kedekatan kekerabatan ini berimbas juga pada penggalangan dukungan yang menggunakan jalur keluarga. Anjuran dan himbuan untuk mendukung calon legislatif yang berasal dari satu kekerabatan atau keturunan banyak bermunculan. Kajian mendalam yang dilakukan oleh Gerald Pomper³ yang merinci tentang pengaruh pengelompokan sosial dalam studi *voting behavior* ke dalam dua variabel, yaitu variabel predisposisi sosial ekonomi keluarga pemilih dan predisposisi sosial ekonomi pemilih (*voter*). Kedua variabel ini mempunyai hubungan yang signifikan dengan perilaku memilih seseorang. Artinya, preferensi politik keluarga, apakah preferensi politik ayah atau ibu akan berpengaruh pada preferensi politik anak.

Ketiga, isu-isu yang berhubungan dengan gerakan femininisme yang selalu diperjuangkan aktifis

³ Pomper, Gerald. 1978. *Voters Choice: Varieties of American Electoral Behavior*. New York: Dodd Mead Company.

perempuan turut mempengaruhi pilihan politik perempuan walaupun masih terbatas. Ada hal hal lain yang mendasar yang harus diperjuangkan oleh perempuan itu sendiri, seperti pendidikan, berorganisasi, ekonomi dan sebagainya. Asumsi gerakan ini adalah merujuk kepada keperluan dan keinginan antara laki-laki dan perempuan yang tidak selamanya sama⁴. Keinginan-keinginan tersebut tidak semuanya dapat dilakukan oleh laki-laki, sehingga perempuan sendiri yang perlu mewakili kaumnya baik dalam politik maupun pemerintahan.

Preferensi dan rasionalisasi Politik

Preferensi politik adalah pilihan tindakan yang berdasarkan nilai-nilai yang diyakini untuk memberikan respon politik yang ada pada diri seseorang⁵. Tindakan politik yang diwujudkan dari nilai-nilai politik yang diyakini seseorang ini menjadi faktor yang sangat menentukan untuk mengarahkan agar merespons situasi

⁴ Seda, Fransisia SSE. 2002, "Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan: Bukan Jumlah Semata", Dalam *Laporan Konferensi: Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan Di Indonesia*. Jakarta: IDEA 2002.

⁵ Greenstein, Fred I. 1975. "Personality and Politics" dalam Fred I. Greenstein and Nelson W. Polsby. *Handbook of Political Science: Micropolitical theory*. Addison-Wesley Publishing Company.

(politik) yang dihadapinya. Bentuk tindakan politik yang diberikan seseorang ini tidaklah sama satu dengan yang lainnya. Tindakan politik ini bergantung pada nilai-nilai apa yang menonjol dalam dirinya pada saat itu. Tidak jarang pula nilai-nilai yang diyakini itu diwujudkan dalam bentuk motivasi dan minatnya terhadap politik.

Karakteristik geografi atau lingkungan di mana individu tinggal dapat pula mempengaruhi aktualisasi nilai-nilai politik seseorang. Namun dengan adanya mekanisme penyaringan (filterisasi) yang berbentuk keyakinan seperti nilai ideologi, agama, kultur, ekonomi dan lain sebagainya menghilangkan pengaruh geografi dan lingkungan politiknya. Sebaliknya karakteristik geografi dan lingkungan tadi dapat pula memperkuat kecenderungan pilihan individu.

Jika pragmatisme dalam politik ada kaitannya dengan rasionalisasi pilihan politik seseorang, apakah pemilih yang berasal dari kelompok kedua masyarakat miskin kota di atas tadi adalah pemilih yang rasional? Lalu bagaimana dengan orang yang mempertahankan pilihannya berdasarkan keyakinannya, apakah mereka tidak rasional? Tentunya jawaban terhadap pertanyaan ini perlu penjelasan yang mendalam. Salah satu model keputusan dalam perilaku memilih (*voting behavior*) ini adalah model rasional. Model ini memiliki

asumsi bahwa seorang pemilih berusaha memaksimalkan manfaat yang diharapkannya dari kesempatan dalam persaingan pilihan. Model pilihan rasional ini memandang ke depan berkaitan dengan implikasi dari pilihan yang dibuatnya. Pemilih dari model ini mengandalkan kepada orientasi informasi yang diperolehnya saat itu. Biasanya pemilih dalam model ini tidak lagi mempertimbangkan masa lalu partai politik tersebut atau masa lalu pilihannya⁶.

Dengan memahami keadaan yang terjadi, pemilih dengan model rasional ini menentukan keuntungan yang ingin diperolehnya dalam sebuah pemilihan umum. Keuntungan tersebut diwujudkan dengan cara menghitung peluang dan kemungkinan sehingga dapat dicapai. Setelah perhitungan terhadap peluang dan kemungkinan itu diperolehnya, barulah si pemilih menentukan keputusannya (*vote*). Model ini terlihat sangat pragmatis, tidak hanya mengandalkan aspek ideologi semata dan latar belakang pilihannya terdahulu. Biasanya individu juga memperhatikan dinamika politik yang terjadi saat itu dengan mengaitkannya dengan keadaan diri

⁶ Himmelweit, H.T., Humpreys, P., Jaeger, M., Katz, M. 1981. *How Voters Decide: a Longitudinal Study of Political Attitudes and Voting Extending over Fifteen Years*. London: Academic Press.

dan lingkungannya. Dengan demikian, rasionalisasi yang dilakukan pemilih lebih merujuk kepada keuntungan yang akan didapatkannya, kalau memilih suatu partai politik.

Rasionalisasi pilihan politik adalah suatu proses penggunaan pikiran oleh individu untuk memikirkan, menimbang dan memutuskan suatu tindakan politik yang sesuai dengan realita politik yang berlangsung dan mampu memperkirakan kemanfaatan keputusan yang dibuat dalam jangka pendek ataupun panjang⁷. Rasionalisasi politik jelas berhubungan dengan kemampuan individu meningkatkan kemanfaatan yang diperolehnya setelah melakukan tindakan politik. Ini berarti ada proses olah pikir berdasarkan realita politik yang dihadapi seseorang serta mampu memperkirakan konsekuensi dari pilihannya itu. Sebaliknya seseorang yang hanya mengandalkan ikatan emosional semata dalam memilih partai politik tidaklah mampu menjangka keuntungan yang diperolehnya baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Realita dalam masyarakat Indonesia yang pada umumnya masih berpendidikan rendah, tidak memungkinkan masyarakat untuk berperilaku rasional dalam memilih partai politik. Keterbatasan pendi-

dikan dan informasi politik yang dimilikinya berakibat pada pilihan politiknya. Di negara-negara sedang membangun seperti Indonesia, tingkat pendidikan seseorang merupakan simbol status sosialnya dalam masyarakat. Dalam berbagai ragam perbedaan dalam struktur sosial ini, yang paling tinggi pengaruhnya terhadap perilaku politik seseorang adalah faktor kelas sosial (status ekonomi) terutamanya di negara-negara industri. Di Eropa kelompok penghasilan rendah dan kelas pekerja cenderung memberikan suara pada Partai Sosialis atau Partai Komunis. Sedangkan kelompok menengah dan atas menjadi pendukung Partai Konservatif⁸. Sherman & Kolker⁹ juga mencontohkan kecenderungan masyarakat kelas bawah dan kelas pekerja di Amerika Serikat. Melalui organisasi buruh mereka cenderung menjadi pendukung Partai Demokrat sedangkan kelas atas dan menengah menjadi pendukung Partai Republik.

Walaupun demikian, sebenarnya pembentukan rasionalisasi politik juga bergantung pada preferensi politik seseorang. Tidak terelakkan pula bahwa preferensi

⁷ Goddin, Robert E. 1976. *The Politics of Rational Man*. Great Britain: The Pitmat Press .

⁸ Denver, David. 1989. *Election and Voting Behavior in Britain*. London: Philip Allen Pub.

⁹ Sherman, Arnold K and Aliza Kolker. 1987. *The Social Bases of Politics*. California: A Division of Wodsworth.

politik seseorang adakalanya memiliki unsur pragmatisme politik. Sebab pragmatisme politik tersebut lahir dari keyakinan seseorang akan perolehan dari aktivitas politik yang diikutinya. Jadi tidak semata-mata identifikasi kepartaian, orientasi terhadap isu dan kandidat menjadi landasan merasionalisasikan pilihan politik individu sebagaimana yang disimpulkan oleh Mashab Michigan. Termasuk di dalamnya harus mempertimbangkan variabel preferensi dan pragmatisme politik. Variabel identifikasi kepartaian dalam pendekatan psikologis tidaklah memerlukan penilaian yang mendalam seperti menggunakan aspek kognisi politik seseorang. Kecenderungan landasan yang digunakan seseorang dalam mengidentikkan dirinya ialah aspek emosinya. Ini berbeda dengan orientasi terhadap isu dan orientasi terhadap kandidat yang jelas memerlukan kognisi politik yang tinggi.

Kognisi politik seseorang dapat bermula timbul dari jenjang pendidikan yang ditempuhnya. Sementara, pengalaman di organisasi sosial dan politik yang ditunjang dengan pendidikan yang memadai semakin menjadikan seseorang sebagai pemilih yang rasional¹⁰. Di negara-negara maju rasionalisasi pemilih terhadap pilihannya pada

partai politik ditentukan oleh aspek ini. Akibatnya partai politik dituntut lebih saksama dalam memiliha isu-isu kampanye serta berusaha menepati janji setelah memenangkan pemilihan umum.

III. METODOLOGI

Untuk menjelaskan masalah penelitian ini, maka metode penelitian survey (*survey research methods*) adalah pilihan yang sesuai. Metode penelitian survey ini diterapkan untuk mengumpulkan data primer karena populasi yang dipelajari dipandang terlalu besar untuk diamati secara langsung¹¹. Populasi penelitian ini adalah kaum perempuan etnis Minangkabau yang berada di perkotaan. Dari populasi tersebut diambil sampel penelitian dengan menggunakan teknik *stratified random sampling* tidak proporsional. Artinya, karena tidak tersedianya kerangka sampel yaitu jumlah perempuan etnis Minang

¹⁰ Woshinsky, Oliver H. 1995. *Culture and Politics: An Introduction To Mass And Elite Political Behavior*. New Jersey: Printicehall.

¹¹ Surachmad, Winarno. 1989. *Metode Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito; Gaffar, Affan. 1992. *Javanese Voters: A case study of election under a hegemonic party system*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press; Neuman, Lawrence W. 1997. *Social Research Methods: Qualitative and quantitative approaches*. London: Allyn and Bacon; Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1995. *Metodologi Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES

yang memilih pada pemilu 2004, maka strata dalam penelitian ini dikembangkan pada representasi individu-individu pemilih yang tempat tinggalnya di kelurahan yang diasumsikan mewakili karakteristik daerah perkotaan yang tingkat heterogenitas, mobilitas, dan ketersediaan informasi politiknya yang tinggi.

Penelitian ini berlangsung di Kelurahan Purus mewakili karakteristik pusat pemerintahan dan perdagangan dan Kelurahan Ikur Koto yang mewakili karakteristik pinggiran kota. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 124 orang. Pengumpulan data utama dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik kuisioner. Setelah semua responden diwawancarai melalui wawancara berstruktur ini, maka dipilih pula beberapa informan dari responden tersebut untuk melengkapi jawaban terutamanya mengetahui preferensi politiknya. Untuk itu, informan dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Preferensi dan Rasionalisasi Pilihan Politik Perempuan Minang di Perkotaan

Preferensi dan rasionalisasi politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aspek “sistem

kepribadian”. Sistem kepribadian ini terdiri dari kecenderungan psikologis dan perilaku sosial yang unik. Karena itu memahami sistem kepribadian ini haruslah berangkat dari pemahaman terhadap dimensi substansi (*content*) dan strukturnya (*structure*). Dimensi substansi dari sistem kepribadian ini terdiri dari elemen-elemen dasar yang terdiri dari nilai dan keyakinan seperti ideologi, motivasi, sikap, kognisi, emosi dan lain sebagainya. Sementara struktur dipahami sebagai usaha mengorganisasikan nilai-nilai menjadi karakteristik atau ciri dari individu tersebut¹².

Keterlibatan seseorang dalam aktivitas politik biasanya dihubungkan dengan motivasinya. Bahkan motivasi seseorang, terutama dalam aktivitas politik, berkaitan dengan lingkungan sosialnya. Oleh karenanya lingkungan sosial menjadi variabel yang menggerakkan munculnya motivasi. Dalam wilayah politik, motivasi seseorang terlibat dalam aktivitas politik yang diikutinya, tidak lain adalah untuk kekuasaan. Harapan untuk memperoleh kekuasaan diharapkan dapat menjadi alat untuk memenuhi tujuan individu yang lain seperti ekonomi, sosial, budaya, psikologis

¹² DiRenzo, J.G. 1974. “Perspectives on Personality and Political Behavior”. Dalam. Gordon J. DiRenzo (ed.). *Personality and politics*, hal. 3-28. New York: Anchor Press.

dan sebagainya. Harold D. Laswell¹³ menjelaskan dengan kekuasaan seseorang dapat mengatasi perasaan rendah dirinya. Paling tidak seorang berpartisipasi dalam kegiatan politik karena adanya keinginan untuk mempengaruhi kekuasaan politik. Dengan demikian, partisipasi politik pada aspek tertentu mengarah pada pemenuhan aspek psikologis individu.

Lalu bagaimana dengan perempuan Minang di perkotaan, apakah mereka terlibat dalam aktivitas politik, seperti ikut memilih dalam pemilu, bagian dari mendapatkan kekuasaan? Jawaban terhadap pertanyaan ini haruslah dimulai dengan memahami sistem kepribadian mereka yang tergambarkan dalam preferensi politik. Penemukenalan personaliti politik perempuan Minang ini bisa dilihat dari partisipasi politiknya, yaitu ikut mencoblos suar suara dalam pemilihan umum. Selain itu perlu pula dipertanyakan apakah partisipasi politik itu memang berdasarkan pada pertimbangan yang rasional atau sebaliknya? Inilah yang harus dijadikan perhatian karena rasionalisasi pilihan politik berhubungan langsung dengan faktor dari dalam diri individu.

Pilihan-pilihan politik (*political preferences*) memberi peluang yang

besar bagi individu untuk menentukan pilihan yang terbaik di antara banyak pilihan yang ada. Namun, jika pembentukan pilihan tersebut dibatasi oleh informasi yang dimiliki, maka pilihannya akan terbatas. Sukar dihindari bahwa dengan keterbatasan ini tidak akan melahirkan model pilihan yang rasional. Apalagi dalam beberapa hal preferensi politik, yang menjadi dasar rasionalisasi, tidak selalu sejalan dengan keputusan pilihan (*voting*) individu dalam sebuah pemilihan umum. Perbedaan ini tidak lain disebabkan oleh situasi pemilihan umum tersebut. Apabila seorang pemilih merasa tidak memiliki keuntungan dengan keputusannya, misalnya peluang kemenangan bagi partai yang dipilihnya, maka ia akan cenderung memilih partai politik yang lain¹⁴.

Karakteristik Responden di Daerah Purus dan Daerah Ikur Koto

Daerah Purus merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan. Daerah ini memiliki dinamika kehidupan masyarakatnya yang tinggi karena pengaruh nilai-nilai dari lingkungannya. Walaupun demikian, tidak semua nilai-nilai

¹³ Lasswell, H.D. 1974. "The Political Personality. Dalam. Gordon J. DiRenzo (ed.). *Personality and Politics*, hal. 29-54. New York: Anchor Press.

¹⁴ Fieldhouse, E., Shryane, N., Pickles., A. 2007. Strategic Voting and Constituency Context: Modeling Party Preference and Vote in Multiparty Election. *Political Geograpy* 26: 159-178.

politik yang berasal dari lingkungan individu sepenuhnya mempengaruhi aktifitas politik masyarakatnya. Ini disebabkan faktor lain, yaitu faktor dari dalam diri individu dalam memahami lingkungannya. Ini dapat dilihat dari pengakuan responden yang pada umumnya tidak begitu tertarik mengikuti perkembangan aktifitas politik, pemerintahan dan partai politik yang ada di lingkungan sekitarnya.

Dari survey yang dilakukan hanya sekitar 11,4 persen responden mengakui tertarik mengikuti masalah politik dan pemerintahan yang ada. Sesuai dengan karakteristik budaya etnik Minangkabau pada umumnya mereka lebih tertarik dengan masalah-masalah keagamaan. Ini terlihat sekitar 84,3 persen responden mengakui lebih tertarik mengikuti masalah keagamaan. Apalagi bagi pemilih perempuan yang paruh baya kedekatannya pada nilai-nilai keislaman dapat menjadi dasar pertimbangan mereka dalam mendukung sebuah partai politik. Ini juga disebabkan oleh karakter masyarakat Minangkabau yang memiliki filosofi *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* sangat kental mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Tabel di bawah ini menguraikan bagaimana ketertarikan responden terhadap masalah-masalah yang ada di lingkungan aktifitas pemerintahan dan

perdagangan serta pinggiran kota. Sementara di Kelurahan Ikur Koto yang merupakan daerah yang memiliki karakteristik daerah pinggiran kota, serapan informasi politik responden sangat terbatas. Kurangnya aktifitas politik serta rendahnya ketersebaran informasi politik mempengaruhi pembentukan preferensi politik perempuan Minang perkotaan.

Pembentukan preferensi politik perempuan Minangkabau berhubungan juga dengan proses sosialisasi politik yang mereka terima. Jamak terjadi proses sosialisasi politik yang mereka terima berasal dari lingkungan keluarga, lingkungan tetangga, sekolah hingga ke tempat kerja. Di daerah Purus sarana yang digunakan dalam proses sosialisasi politik responden sangat beragam. Ini berarti tidak semua responden yang mendapatkan sosialisasi politik dari semua sarana sosialisasi tersebut. Rendahnya pemanfaatan sarana sosialisasi politik ini berdampak pula pada pembentukan preferensi politik perempuan Minangkabau di perkotaan. Seperti yang diketahui dalam proses sosialisasi tersebut berlangsung transformasi nilai dan keyakinan politik sehingga mempengaruhi preferensi politik seseorang. Apabila transformasi nilai dan keyakinan politik melalui pemanfaatan sarana sosialisasi politik

tidak berlangsung sempurna, maka preferensi politik individu juga tidak sempurna.

Sarana sosialisasi juga belum dapat dimaksimalkan pemanfaatannya oleh responden di daerah Ukur Koto. Sosialisasi nilai dan keyakinan politik dari orang tua responden hampir tidak pernah terjadi. Ini berbeda dengan responden yang hidup di daerah pusat perdagangan dan pemerintahan di mana nilai dan keyakinan politik yang berasal dari orang tua dapat berkembang.

Konsistensi pilihan politik bisa dijadikan acuan untuk melihat bagaimana rasionalnya pilihan politik seseorang. Semakin konsisten seseorang dengan sulit melepaskan diri dari pilihan politik masa lalunya, maka semakin besar peluang mereka bertindak sesuai dengan model rasional dalam *voting*. Semenatra itu, konsistensi pilihan politik perempuan Minangkabau perkotaan terhadap partai politik ini tidak hanya menyangkut aspek afeksi semata tetapi juga berhubungan dengan aspek lain, yaitu kognisi dan konasi. Ketiga aspek ini merupakan hal terpenting dalam menemukannya kategori respons individu. Kedekatan emosional (*feeling*) perempuan Minangkabau perkotaan terhadap objek politik dapat diketahui dengan menanyakan bagaimana kedekatan perasaannya terhadap partai politik.

Untuk mengetahui aspek kognisi perempuan Minangkabau perkotaan di

daerah penelitian dapat dilihat dari tingkat pendidikan mereka. Kognisi individu sebagai bentuk respons politik dapat dikenali dari dua bentuk: (1) *verbal*, yaitu ditunjukkan dengan ungkapan keyakinan yang dimanifestasikan dalam tindakan terkait dengan pemikirannya terhadap suatu objek politik; (2) *non verbal*, yaitu reaksi secara persepsi terhadap stimulus politik yang ada. Salah satu indikator bagaimana pengaruh kognisi politik perempuan Minangkabau dalam proses politik dapat dilihat pada pendidikan yang mereka miliki.

Aspek konasi berkaitan dengan kecenderungan perilaku individu yang terdiri dari komitmen, maksud dan tindakan individu terhadap stimulus yang datang kepadanya. Dalam konteks ini, konasi perempuan Minangkabau perkotaan dapat dikenali dengan keterlibatannya dalam aktifitas politik yang ada di lingkungannya. Dalam arti lain keterlibatan mereka ini adalah bagian dari partisipasi politik. Realitanya responden di daerah Purus dan Ikur Koto memiliki tingkat partisipasi politik yang rendah. Selain pemberian suara hampir tidak ada responden yang terlibat dalam aktifitas politik lain, meskipun sebagian dari mereka konsisten untuk tetap memilih partai politik yang didukungnya. Sebagian besar responden hampir tidak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan politik

seperti mengikuti kampanye, pertemuan akbar serta kegiatan sosial lain yang diselenggarakan oleh partai politik.

Sementara itu di daerah Ikur Koto yang merupakan daerah pinggiran kota, responden mempunyai perilaku yang hampir sama dengan daerah Purus. Pada umumnya responden memang tidak pernah mengikuti kegiatan politik yang diselenggarakan oleh partai politik baik pada kegiatan pemilihan umum maupun di luar pemilihan umum.

Preferensi politik dibentuk oleh sistem nilai individu yang dimanifestasikan oleh perilaku politiknya, dan ini hanya diperoleh melalui proses sosialisasi. Jika proses pembentukan sistem nilai politik melalui sosialisasi politik tidak berlangsung sempurna, maka rasionalisasi politik pun tidak sempurna. Akibatnya pilihan politik individu hanya berdasarkan pada emosional semata tanpa didukung oleh kalkulasi rasional.

Rasionalitas pemilih terkait dengan usaha individu melepaskan diri dari ikatan masa lalu dengan partai politik, selanjutnya membentuk pilihan dengan pertimbangan keuntungan yang diperolehnya dari pilihan tersebut. Dalam keadaan ini informasi politik yang dimiliki individu menjadi dasar untuk menentukan pilihannya. Ketatnya persaingan partai politik bersaing

mendapatkan pemilih dalam pemilihan umum, sebenarnya memberi keuntungan bagi individu. Sebenarnya mereka dapat mengambil keuntungan dari persaingan partai politik tersebut. Kecenderungan ini akan melahirkan sikap yang pragmatis untuk menghasilkan manfaat baik langsung maupun tidak langsung dalam proses pemilihan.

Rasionalisasi pilihan politik perempuan Minangkabau berkaitan dengan kemampuannya menghitung peluang untuk memperoleh keuntungan dari pilihannya tersebut. Secara teoritis rasionalisasi politik ini tidak begitu memperhatikan pilihan mereka pada masa lalu dan lebih melihat kepada masa depan. Ini berarti keterikatan individu dengan pilihan politiknya pada masa lalu bukanlah sesuatu yang penting. Landasan utama individu tersebut menentukan pilihannya ditentukan oleh keadaan lingkungan dengan informasi politik yang tersedia pada waktu itu. Merujuk pada kenyataan ini, maka informasi politik yang menjadi basis pilihan politik tersebut bisa diperoleh dari beberapa sarana yang tersedia.

Penguasaan terhadap media informasi politik secara baik dapat menambah nilai dan keyakinan individu terhadap politik. Namun, dari hasil survey yang dilakukan ternyata pemanfaatan media elektronik tidaklah dimanfaatkan

untuk memperoleh informasi politik. Sebagai besar informan di kedua daerah penelitian lebih cenderung menggunakan media elektronik untuk memenuhi kebutuhan mereka terhadap dunia hiburan. Oleh karenanya preferensi politik perempuan Minangkabau perkotaan yang menjadi responden cenderung berbentuk tidak lengkap (*incomplete preferences*). Ketidaklengkapan nilai dan keyakinan politik ini berimbas pada rasionalisasi gejala politik pada diri responden.

Bentuk Preferensi dan Rasionalisasi Politik Perempuan Minangkabau

Dari survey yang dilakukan terhadap responden di dua daerah yang mewakili karakter geografis tertentu, dapat dilihat perempuan Minangkabau yang menjadi responden pada umumnya masih belum menunjukkan model pemilih yang rasional. Hal ini diindikasikan oleh hal-hal berikut. *Pertama*, secara teori model rasional dalam *voting* berkaitan dengan pilihan individu yang berorientasi ke depan sehingga individu sebagai subjek politik dapat mengambil manfaat dari pilihan politiknya tersebut. Ini juga bermakna individu sebagai pemilih tidak terikat dengan pilihan politiknya di masa lalu sehingga dapat memberikan evaluasi terhadap pilihan yang pernah dibuat. Jika merujuk pada hasil survey yang dilakukan, sebagian besar perempuan Minangkabau perkotaan yang menjadi responden sangat bergantung pada pilihan masa

lalunya. Mereka secara konsisten tetap mendukung partai politik yang dipilihnya pada pemilu yang lalu. Konsistensi pilihan politik individu tersebut tidak diikuti oleh proses evaluasi terhadap pilihan tersebut. Dengan demikian wujud konsistensi dukungan yang diberikan perempuan Minang perkotaan lebih menyandarkan pada aspek afeksinya sehingga cenderung tidak rasional.

Kedua, konsistensi pilihan dalam model rasional sangat diperlukan, tetapi diiringi dengan kemampuan individu memahami hal-hal yang bersifat ideologis serta dapat dipraktikkan dalam kehidupannya (*pragmatisme*). Namun dalam kenyataannya konsistensi pilihan politik perempuan Minang yang menjadi responden tidak berdasarkan pada ideologi. Mereka hanya berpegang kepada figur tokoh yang ada dalam partai politik. Akibatnya konsistensi pilihan politik tersebut tidak memiliki arti bagi kepentingannya dan malah menyulitkan mereka menentukan pilihan politiknya jika dihadapkan antara memilih partai politik atau kandidat. Biasanya orientasi pemilih terhadap partai politik yang dipilihnya akan berbeda dengan orientasi terhadap kandidat yang dipilihnya.

Ketiga, secara teori model rasional dalam *voting* sangat bergantung pada serapan informasi politik individu untuk memperkuat

pilihan politiknya. Serapan terhadap informasi politik sangat bergantung pula kepada tingkat pendidikan individu. Masih terbatasnya tingkat pendidikan responden yang pada umumnya hanya menjejak sekolah menengah berdampak pada pemahamannya terhadap informasi politik yang diserap. Akibatnya mereka akan kesulitan untuk menentukan sebuah pilihan politik yang membawa keuntungan bagi dirinya. Namun faktor pendidikan bukanlah satu-satunya variabel yang menentukan rasionalisasi terhadap pilihan politik responden. Hasil hitung yang dilakukan diperoleh nilai *chi square* sebesar 3,908 dengan df.6. Sementara dengan tingkat kepercayaan 95 persen, nilai tabel *chi square* adalah 15,592. Karena nilai hitung lebih kecil dari nilai tabel maka hipotesis ditolak. Ini berarti tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan perempuan Minangkabau yang menjadi responden dengan pilihannya terhadap partai politik. Begitu juga dengan responden yang ada di daerah Ikur Koto. Dari hasil hitung terhadap hubungan tingkat pendidikan dengan pilihan responden terhadap partai politik tidak terdapat hubungan antara keduanya. Nilai *chi square* hitung dengan df.8 adalah 14,259 lebih kecil dari nilai tabel *chi square* sebesar 15,507 dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Keempat, tidak termanfaatkannya media sosialisasi politik di lingkungan perempuan Minangkabau yang menjadi responden berdampak pada pembentukan nilai dan keyakinan politik mereka. Dari survey yang dilakukan di dua daerah penelitian, yaitu pusat perdagangan dan pemerintahan serta pinggiran kota bisa dilihat peran sarana sosialisasi politik tidak optimal. Keluarga sebagai agen utama proses sosialisasi politik belum mampu membentuk nilai dan keyakinan politik yang sesuai dengan model pilihan rasional. Hasil survey yang dilakukan terhadap responden di dua daerah penelitian ini mengatakan keluarga (i.e. sesama anggota keluarga dan orang tua) sebagai sarana sosialisasi politik tidak pernah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Menurut Dolan¹⁵ sosialisasi politik dalam keluarga itu mempengaruhi pembentukan nilai dan keyakinan politik individu pada dua aspek: (1) kemampuan keluarga memberikan anak perilaku, nilai dan identitas politik khusus; (2) perluasan dari kemampuan cakupan pertama dengan membentuk struktur perilaku anak secara politik berkaitan dengan

¹⁵ Dolan, K. 1995. "Attitudes, Behaviors, and The Influence of The Family: A Reexamination of The Role of Family Structure. *Political Behavior* 17(3):251-264.

figur politik, pemimpin dan pemerintahan.

Model rasional yang terbentuk dari akumulasi preferensi politik individu tidak sepenuhnya dapat dijumpai dalam perilaku memilih perempuan Minangkabau perkotaan. Terbatasnya informasi politik dan pemanfaatan sarana sosialisasi politik dalam membentuk nilai dan keyakinan politiknya menjadi faktor penghambat munculnya model rasional ini. Bahkan faktor lingkungan yang menjadi faktor utama tidak dominan mempengaruhi kecenderungan pembentukan model pemilihan rasional ini baik di daerah Purus maupun Ikur koto. Dengan demikian kecenderungan model rasional pilihan politik perempuan Minangkabau perkotaan ditentukan dari faktor lain yaitu program partai politik dan tokohnya. Kecenderungan ini memang relevan dengan perilaku responden sebab terbentuknya pragmatisme politik pemilih perempuan berhubungan dengan program dalam bentuk kegiatan apa yang dibuat oleh partai politik.

Berbeda dengan dasar pertimbangan pada ideologi yang abstrak sehingga sulit untuk diwujudkan oleh responden dalam perilaku memilihnya. Apalagi dalam kenyataannya pendidikan mereka tidak berpengaruh terhadap pilihan politiknya sehingga menyebabkan pula kesukaran untuk memahami partai politik secara ideologis. Dari hasil hitung terhadap kedekatan ideologi responden di

daerah Purus *chi square* sebesar 2,074 dengan df.4 ternyata lebih kecil dari nilai *chi square* tabel sebesar 9,488 pada tingkat kepercayaan 95 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara kedekatan ideologi dengan pilihan responden terhadap partai politik. Tidak adanya hubungan ini juga mempengaruhi cara partai menarik dukungan politik masyarakat dalam pemilihan umum. Pada umumnya partai politik lebih memilih kampanye non ideologis seperti hiburan, kegiatan sosial dan sebagainya. Sebab ini cara yang efektif menarik simpati responden untuk mengikuti aktifitas politik yang dirancangnya. Ini berbeda dengan alasan pilihan responden terhadap program dan tokoh partai politik yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan. Dari hasil hitung diperoleh nilai *chi square* sebesar 16,808 dengan df.4 lebih besar dari nilai *chi square* tabel sebesar 9,488 dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Ini berarti ada hubungan yang signifikan antara pertimbangan responden berdasarkan program dengan pilihannya terhadap partai politik. Nilai *chi square* hitung yang diperoleh adalah sebesar 10,588 dengan df.4 lebih besar dari nilai tabel *chi square* sebesar 9,488 dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, yaitu ada hubungan antara

kedekatan dengan tokoh dengan pilihannya terhadap partai politik.

Sementara itu hubungan kedekatan responden dengan partai politik di daerah Ikur Koto, berdasarkan hasil hitung terhadap *chi square*, diperoleh nilai 16,434 lebih besar dari nilai *chi square* tabel sebesar 9,488 dengan df.4 dan tingkat kepercayaan 95 persen. *H0* ditolak dan *H1* diterima. Ini berarti kedekatan secara ideologi mempengaruhi pilihan responden terhadap partai politiknya. Kecenderungan ini berbeda dengan perilaku responden di daerah Purus. Kedekatan responden dengan partai politik di daerah Ikur Koto dipengaruhi oleh kedekatan ideologi.

Pilihan responden terhadap partai politik di daerah Ikur Koto ini dipengaruhi juga oleh program partai politik tersebut. Dari hasil hitung *chi square* diperoleh nilai sebesar 17,369 dengan df.4 pada tingkat kepercayaan 95 persen lebih besar dari nilai *chi square* tabel sebesar 9,488. Dengan demikian *H0* ditolak dan *H1* diterima, yaitu ada hubungan antara kedekatan responden berdasarkan program partai politik. Dengan merujuk pada hasil *chi square* hitung pada tingkat kepercayaan 95 persen dan df.4 diperoleh nilai 35,198 lebih besar dari nilai *chi square* tabel sebesar 9,488. Dengan demikian tokoh dan figur dalam partai politik berpengaruh besar terhadap pilihan responden terhadap partai politik.

Pembentukan preferensi dan rasionalisasi politik perempuan Minangkabau perkotaan tidak sepenuhnya ditentukan oleh aspek ideologi namun lebih ditentukan oleh aspek program partai politik dan ketokohan seseorang di dalam partai politik. Sementara preferensi dan rasionalisasi politik responden sangat dominan ditentukan oleh program partai politik dan tokoh yang ada dalam partai tersebut.

Preferensi politik perempuan Minang perkotaan pada umumnya memiliki karakteristik *asimetrical*. Preferensi politik *asimetrical* adalah pilihan politik individu tanpa mengacu pada tujuan yang sesungguhnya. Pilihan yang dibuat individu tersebut tidak sesuai dengan tujuan politik yang diharapkan¹⁶. Pada umumnya responden di dua daerah penelitian ini menginginkan adanya perubahan menuju kehidupan mereka yang lebih baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Bagi responden, dengan memilih partai politik yang merupakan mitra pemerintah daerah, seharusnya partai politik ini dapat mengendalikan program-program pemerintah daerah sehingga membawa keuntungan bagi mereka. Namun pilihan politik mereka terutama dalam pemilihan umum tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya.

¹⁶ Goddin, Robert E. 1976. *Op cit.*

Pada sisi lain, faktor lingkungan eksternal tidak begitu dominan menentukan pembentukan preferensi dan pilihan politik perempuan Minang perkotaan. Ini terlihat dari perilaku memilih perempuan Minang perkotaan di daerah Purus dan Ikur Koto. Responden di daerah Purus tidak menunjukkan ketertarikannya terhadap masalah politik, pemerintahan dan partai politik. Padahal dalam konteks geografi, daerah Purus merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan dengan informasi politik yang tersebar luas di lingkungannya. Kenyataan ini berbeda dengan daerah Ikur Koto yang merupakan daerah pinggiran kota dengan informasi politik yang terbatas.

V. KESIMPULAN

Preferensi dan rasionalisasi politik adalah dua konsep dalam kajian perilaku politik yang saling berhubungan. Kedua konsep tersebut menjadi penentu bagaimana seseorang merespons gejala politik yang ada. Preferensi politik terdiri dari nilai dan keyakinan politik seseorang yang menjadi dasar untuk membuat pertimbangan politik. Pertimbangan politik tersebut dirasionalkan sesuai dengan tujuan yang hendak diwujudkan. Apabila antara preferensi politik yang dirasionalkan tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan

individu, maka preferensi politiknya bersifat *asimetrical*. Sebaliknya, apabila sesuai dengan tujuan yang hendak diwujudkan, maka preferensi politiknya disebut *complete*. Dalam kenyataannya bentuk preferensi politik perempuan Minang perkotaan yang menjadi responden adalah *asimetrical*. Implikasinya tentu pada pembentukan sikap individu berpolitik yang cenderung menjadi tidak rasional.

Perempuan Minangkabau perkotaan memiliki preferensi politik yang terbatas. Akibatnya kecenderungan respons politik yang diberikan juga terbatas. Ini dapat dilihat dari wujud respons politik mereka, khususnya dalam bentuk partisipasi politik hanya sebatas *voting* dalam pemilu. Keterbatasan ini juga dipengaruhi oleh status sosial ekonominya seperti rendahnya tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan. Pada umumnya responden yang dijumpai berpendidikan rendah hingga menengah dan tidak memiliki pekerjaan. Ini tentu akan menyulitkan mereka untuk merasionalkan gejala politik yang dihadapi agar dapat direspons sesuai dengan kebutuhannya. Rasionalisasi politik berlangsung apabila seseorang memiliki tujuan yang jelas terhadap aktifitas politik yang diikutinya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Asrinaldi, Bakaruddin RA., Syahrizal. 2005. “*Political Response* Kaum Miskin Perkotaan 1999-2004: Kajian terhadap Preferensi Politik, Identifikasi Kepartaian dan Perilaku Memilih Kasus di Tiga Kota Medan, Padang dan Pekanbaru”. *Laporan Penelitian Riset Unggulan Kemasyarakatan Dan Kemanusiaan (RUKK)*- Kementerian Ristek-LIPI.
- Asrinaldi dan Kusdarini. 2005. “Bagaimana Perempuan *Voting*: Kajian tentang Perilaku Memilih Perempuan Etnis Minangkabau di Daerah Urban Pada Pemilu 2004”. *Laporan Penelitian Studi Kajian Wanita-DP3M* Dikti.
- Denver, David. 1989. *Election and Voting Behavior in Britain*. London: Philip Allen Pub.
- Gaffar, Afan. 1992. *Javanese Voters: A case study of election under a hegemonic party system*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Goddin, Robert E. 1976. *The Politics of Rational Man*. Great Britain: The Pitmat Press .
- Greenstein, Fred I. 1975. “Personality and Politics” dalam Fred I. Greenstein and Nelson W. Polsby. *Handbook of Political Science: Micropolitical theory*. Addison-Wesley Publishing Company.
- Neuman, Lawrence W. 1997. *Social Research Methods: Qualitative and quantitative approaches*. London: Allyn and Bacon
- Pomper, Gerald. 1978. *Voters Choice: Varieties of American Electoral Behavior*. New York: Dodd Mead Company.
- Seda, Fransisia SSE. 2002, “Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan: Bukan Jumlah Semata”, Dalam *Laporan Konferensi: Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan Di Indonesia*. Jakarta: IDEA 2002.
- Sherman, Arnold K and Aliza Kolker. 1987. *The Social Bases of Politics*. California: A Division of Wodsworth.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1995. *Metodologi Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES
- Surachmad, Winarno. 1989. *Metode Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito

- Woshinsky, Oliver H. 1995. *Culture and Politics: An Introduction To Mass And Elite Political Behavior*. New Jersey: Printicehall.
- DiRenzo, J.G. 1974. "Perspectives on Personality and Political Behavior". Dalam. Gordon J. DiRenzo (ed.). *Personality and politics*, hal. 3-28. New York: Anchor Press.
- Lasswell, H.D. 1974. "The Political Personality. Dalam. Gordon J. DiRenzo (ed.). *Personality and Politics*, hal. 29-54. New York: Anchor Press.
- Himmelweit, H.T., Humpreys, P., Jaeger, M., Katz, M. 1981. *How Voters Decide: a Longitudinal Study of Political Attitudes and Voting Extending over Fifteen Years*. London: Academic Press.
- Fieldhouse, E., Shryane, N., Pickles., A. 2007. Strategic Voting and Constituency Context: Modeling Party Preference and Vote in Multiparty Election. *Political Geograh* 26: 159-178.
- Dolan, K. 1995. "Attitudes, Behaviors, and The Influence of The Family: A Reexamination of The Role of Family Structure. *Political Behavior* 17(3):251-264.